



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2019/Khusus - Calon PN)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : MAHKAMAH SYARIAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SUB UNIT KERJA : MAHKAMAH SYARIAH SIGLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HUSAINI
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 86936

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/60 m2 di ACEH SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah Seluas 232 m2 di ACEH BARAT DAYA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 239 m2/191 m2 di ACEH BARAT DAYA, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 850.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/42 m2 di ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 146.100.000

1. MOBIL, TOYOTA CALYA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 132.000.000
2. MOTOR, HONDA AFX120210C8 MT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, HONDA NF 1001 001 Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.996.587

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.401.096.587

III. HUTANG Rp. 886.127.500

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

514.969.087

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **16 April 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.